

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 membuat kelumpuhan di setiap aspek kehidupan, sehingga membuat kegiatan masyarakat menjadi terganggu. Sebagai langkah dalam melakukan pengendalian penyebaran virus covid-19, kebijakan PPKM diberlakukan di Indonesia. Akibat dari munculnya gelombang kedua penyebaran virus covid-19 membuat pemerintah menetapkan kebijakan PPKM Darurat. Kebijakan ini secara garis besar tidak melumpuhkan kegiatan masyarakat tetapi lebih mengarah kepada pembatasan kegiatan, namun memiliki sandungan didalamnya. Usaha PKL yang menggantungkan pekerjaannya dari keramaian yang sedang dibatasi membuat adanya penurunan pendapatan. Pembatasan jam operasional hingga bantuan yang terkendala menjadi hambatan lainnya. Penelitian ini mempergunakan teori implementasi kebijakan dari model yang dibuat oleh Merilee S. Grindle untuk menjelaskan dan menjawab mengenai penerapan kebijakan PPKM Darurat terhadap usaha PKL di Kota Tasikmalaya. Model ini menekankan pada isi dan lingkungan kebijakan sebagai faktor keberhasilan implementasi.

Metode kualitatif analisa deskriptif digunakan sebagai metode penelitian dengan pendekatan fenomenologi dan penggunaan pendekatan institusional lama sebagai pendekatan ilmu politik. Data primer yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap informan terpilih melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Sedangkan data sekunder didapat dari meninjau buku, jurnal, serta artikel terkait.

Penerapan Kebijakan PPKM Darurat terhadap usaha PKL di Kota Tasikmalaya berlangsung sesuai dengan model implementasi kebijakan Grindle. Sumber daya, pemanfaatan, hingga lingkungan yang terlibat berjalan sesuai hal yang menjadi tujuan. Berbanding terbalik dengan pencapaian dari penerapan kebijakan PPKM Darurat, program bantuan pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha justru tidak berjalan lancar. Beberapa PKL mengaku tidak mendapat bantuan pada tahun 2021. Dinas Koperasi, UMKM, dan Indag mengklaim bahwa terjadinya gagal verifikasi di pusat.

Kata kunci: Kebijakan PPKM Darurat, Pedagang Kaki Lima, Bantuan

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has affected every aspect of life, so has disrupted community activities. As step of control the spreads of covid-19 virus, PPKM policy has applied in Indonesia. As a result of the second wave spread of the covid-19 virus, the government established PPKM Darurat policy. In general, this policy does not affected to community activities, but have stumbling blocks in them. Bussines of PKL who depend on their work from the crowds who are currently being restricted has resulted in a decrease income. Limitation of operationg hours until government assistance is another obstacle. This research uses theory of policy implementation from the model created by Merilee S. Grindle to explain and answer regarding implementation of PPKM Darurat to bussines of PKL. This model pointed the content and policy environment as a factor for successful implementation.

Descriptive analysis qualittative method is used as a research method with phenomenology approach and the use of the old institutional approach as a political science approach. The primary data used in depth interviews with selected informants through purposive and snowball sampling technique.

The implementation of PPKM Darurat Policy on Pedagang Kaki Lima in the city of Tasikmalaya went according to model implementation of Grindle. Resources, utilization, to the environment involved are in accordance with this. Contrast to achievement of the implementation of the PPKM Darurat Policy, the government programs provided (grant) to Pedagang Kaki Lima did not run smoothly. Several Pedagang Kaki Lima claimed that they did not receive grant in 2021. Dinas Koperasi, UMKM, and Indag claimed that there was a failure of verifivation at the center.

Keyword: *PPKM Darurat Policy, Pedagang Kaki Lima, Grant*